



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DWINAN MARCHIAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **866253**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **4.960.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/190 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/192 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/231 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/102 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 4.515 m2/4.515 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
6. Tanah Seluas 3040 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **14.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **5.000.000**

D. SURAT BERTHARGA

Rp. **1.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **4.000.000**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **84.000.000**

Sub Total

Rp. **5.068.000.000**



III. HUTANG

Rp. 750.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.318.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.